

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2019/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SUB UNIT KERJA : BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN, KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MURSAL
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN, KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM
3. NHK : 628476

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.987.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/220 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 7500 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 2.220.000.000
3. Tanah Seluas 8900 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 267.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 10.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.000.000

D. SURAT BERTAHAP Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 22.250.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.034.250.000

III. HUTANG Rp. 106.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.928.250.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **21 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.